

Luerdi. (2014, May 26). "Siapakah SDM Kita Menghadapi MEA?" Haluan Riau, p.4.

### Siapakah SDM Kita Menghadapi MEA?

Beberapa bulan yang lalu seorang teman diterima sebagai pengajar di satu sekolah swasta di Pekanbaru. Menurut penuturan pimpinannya, ia adalah orang Indonesia pertama yang diterima untuk menjadi pengajar Sains di lembaga itu. Penulis sempat bertanya; apakah tidak ada sarjana lokal yang bisa memenuhi kriteria sampai-sampai lembaga tersebut 'terpaksa' merekrut orang Filipina ataupun orang asing lainnya. Lembaga tersebut memang memberlakukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk subjek-subjek tertentu termasuk Sains. Dari sini masalahnya mulai tampak jelas; kemampuan bahasa asing.

Gambaran di atas hanyalah sedikit sentilan tentang kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah. Memang kemampuan bahasa asing bukanlah satu-satunya nilai penentu kualitas SDM. Bahasa asing perlu tapi bukanlah segala-galanya. Tingkat kompetensi atas bidang yang ditekuni selama duduk di bangku sekolah atau perguruan tinggi, *lifeskill* yang diperoleh melalui lembaga-lembaga pelatihan ataupun pengalaman, dan kemudian diikuti oleh kemampuan beradaptasi merupakan hal yang terpenting.

*ASEAN Economic Community (AEC)* atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan segera diberlakukan pada 2015 mendatang. MEA merupakan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dan merupakan salah satu pilar integrasi masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) yang telah ditetapkan pemerintah negara-negara ASEAN beberapa tahun yang lalu. Di atas kertas, integrasi ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil jurang sosio-ekonomi penduduk di negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia menyadari ada peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi dalam implementasi MEA.

Inti dari integrasi ekonomi ini adalah pemberlakuan pasar bebas atau liberalisasi ekonomi untuk menjadikan kawasan sebagai pasar tunggal berbasis produksi. Liberalisasi yang diterapkan akan memberikan ruang yang lebih luas dan lebih lancar bagi pergerakan arus produk/barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil (*skilled labors*) intra negara-negara ASEAN.

Indonesia tidak dapat mengelak dari globalisasi dan tuntutan MEA selain memang adanya *political will* untuk mewujudkan agenda tersebut. Penduduk yang ada di dalamnya pun tak bisa lepas dari konsekuensi kebijakan yang telah dibuat. Pergerakan lintas batas negara tenaga kerja terampil dengan pendidikan yang lebih baik seperti dokter, perawat, insinyur, akuntan dan tenaga kerja profesional lainnya akan menjadi hal yang lumrah. Namun MEA adalah ruang berkompetisi di mana tenaga kerja terampil dalam negeri akan bersaing dengan tenaga kerja terampil asing.

Salah satu kekhawatiran dalam implementasi MEA bagi Indonesia terkait masalah SDM. Di tengah-tengah tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terdapat berjuta tenaga kerja tak terampil (*unskilled*) berlatar belakang pendidikan rendah.

Jumlah tenaga kerja terampil yang dihasilkan perguruan tinggi juga masih sangat kurang, tak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia. Sementara Indonesia adalah pasar terbesar di kawasan sehingga diperkirakan menjadi sasaran penyebaran SDM asing.

Disparitas pendidikan antar negara-negara ASEAN berdampak pada dan berjalan seiring dengan disparitas SDM yang dihasilkan. Dalam survei yang dilakukan oleh *QS. World University Rankings (2013)*, 5 universitas teratas (*top 5*) di tingkat kawasan Asia Tenggara berada di Singapura, Thailand dan Malaysia. Dua dari beberapa kriteria yang dinilai adalah *academic reputation* dan *employer reputation*. Berdasarkan hasil survei lembaga independen tersebut, Indonesia masih tertinggal dari ketiga negara yang disebutkan tadi yang kini sedang memimpin ekonomi ASEAN.

*Academic reputation* menyangkut citra perguruan tinggi dalam menghasilkan karya saintifik yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat, sedangkan *employer reputation* menyangkut tempat di mana para sarjana atau tamatan perguruan tinggi tersebut menerapkan kompetensi yang mereka miliki. Semakin banyak karya yang dihasilkan dan semakin banyak tamatan yang bekerja di institusi-institusi bergengsi maka semakin tinggi tingkat *positioning* perguruan tinggi tersebut.

MEA dapat menjadi peluang bagi SDM terampil nan handal dalam negeri untuk menyalurkan kompetensi yang dimiliki secara lebih luas di kawasan, tidak terbatas di dalam negeri saja. Begitu juga disparitas kualitas perguruan tinggi dan pendidikan dapat diperkecil. Dunia ibaratkan satu jaring laba-laba di mana tiap helai jaringnya saling terhubung dan terjalin. Integrasi negara-negara ASEAN akan memungkinkan terjadinya *excellence sharing* antar perguruan tinggi di seluruh negara ASEAN termasuk yang ada di daerah-daerah.

Konektifitas yang intens dan tuntutan adaptasi akan mampu memaksa kita mengejar ketertinggalan baik dari pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, negara dengan ekonomi yang lebih baik memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik pula, begitu pula sebaliknya.

Lalu bagaimana dengan kesiapan SDM lokal yang ada di Riau? Sama halnya dengan daerah lain, masih banyak mahasiswa dan sarjana yang belum mengerti atau tidak tahu sama sekali apa itu 'MEA' ataupun 'AEC'. Sumber daya alam yang melimpah dan potensi pasar yang ada tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya bila SDM masih belum mampu bersaing. Jangan sampai para sarjana lokal kaget bila di berbagai sektor bisnis ternyata terdapat orang-orang dari negara tetangga yang lebih kompetitif dan lebih mampu beradaptasi di 'tanah' sendiri. Sementara masih banyak saja yang 'terlena' mendambakan status PNS yang jumlahnya sangat terbatas, dan enggan pula untuk meningkatkan kualitas diri. Bila tidak merubah cara pandang, SDM di sini hanya akan menjadi 'penonton' atau 'pemeriah'.

Pemerintah daerah juga dituntut bersiap menghadapi MEA. Pemda dapat bersinergis dengan perguruan tinggi yang ada di daerah untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat khususnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM lokal. Karena pada dasarnya pemerintah daerahlah yang akan merasakan langsung kebijakan MEA, sementara pemerintah pusat hanya sekedar memfasilitasi konsultasi dan membuat regulasi. Siapkah SDM kita menghadapi MEA? Mempertimbangkan semakin dekatnya implementasi MEA, mau tidak mau SDM kita akan menghadapinya? \*